

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (1991). Ilmu Pendidikan. Rineka Cipta.
- Azizah, R. N. (2020). Manajemen Strategi Bisnis pada Lemabaga Bimbingan Belajar Primagama Cabang Bendul Merisi Surabaya. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Hamalik, O. (2004). Psikologi Belajar dan Mengajar. Sinar Baru Algensindo.
- Hollander, Anita S. (Anita Sawyer); Cherrington, J. Owen; Denna, Eric L. (2000). Accounting, information technology, and business solutions / Anita S. Hollander, Eric L. Denna, J. Owen Cherrington. New York :: Irwin McGraw-Hill,.
- Kabupaten Bantul. (n.d.). *Data Pendidikan Kabupaten Bantul*. Diambil kembali dari Diakses tanggal 13 November 2021, dari [https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000025/data pendidikan.html](https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000025/data%20pendidikan.html)
- Kemdikbud. (n.d.). *Jumlah Data Peserta Didik Per Kabupaten/Kota : Kab. Bantul*. Diambil kembali dari Diakses tanggal 13 November 2021, dari https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_index.php?kode=040100&level=2
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Menkeu: Penerimaan Pajak hingga April 2021 Capai 30,94% dari Target*. Diambil kembali dari Diakses tanggal 13 November 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-penerimaan-pajak-hingga-april-2021-capai-30-94-dari-target/>
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. (2017). Optimalisasi Pajak atas Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 31-17.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. (n.d.). Diambil kembali dari Diakses tanggal 30 April 2022, dari <https://www.bantulkab.go.id>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. (n.d.). Diambil dari Diakses tanggal 30 April 2022, dari <https://disdukcapil.bantulkab.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sianturi, I. T. (2020). Potensi Pajak Penghasilan Bimbingan Belajar di Kecamatan Medan Baru . *Politeknik Keuangan Negara STAN*.